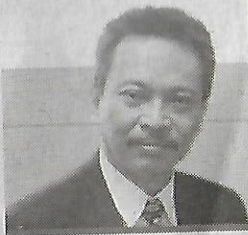


Memaknai Rekam Jejak Calon Legislator

SABTU (MANIS) 27 APRIL 2013
16 JUMADIL AKHIR 1434 H
JUMADIL AKHIR 1946



Dadang Iskandar

Dosen Kopertis IV Jabar Banten
dpk FKIP Unpas Bandung

MEMILIH caleg (calon legislator) 2014-2019 jangan sampai terjebak pada sisi pencitraan sesaat ketika pesta demokrasi berlangsung. Memilih calon legislator tidak seperti tebak nama, otak atik pilih nomor urut setelah itu jatuh pada pilihan yang salah. Konstituen harus lebih cerdas dalam menentukan pilihan, sebab satu suara akan menentukan nasib kita selama lima tahun ke depan.

Kini tahapan pemilu legislasi memasuki babak baru dan KPU tengah memulai proses pencalegan, meski masih ada ruang waktu untuk memperbaharui dari daftar calon sementara (DCS) ke daftar calo tetap (DCT). Dalam proses tersebut hampir semua partai membuka kesempatan kepada kalangan eksternal untuk menjadi caleg. Di sinilah perlu kecerdasan konstituen melihat

rekam jejak politisi yang akan dijadikan pilihan. Apakah rekrutmen sosok caleg untuk Pemilu 2014 akan menghasilkan DPR/DPRD yang berkualitas? Apakah kita dapat berharap kualitas anggota legislatif 2014-2019 akan lebih baik dibanding kan dengan sekarang?

Kesadaran politik harus dibangun dari rekam jejak, agar kita tidak lagi dibodohi oleh argumentasi politik yang menjanjikan. Strategi membuat janji menjadi landasan kesadaran dalam berpolitik pragmatis. Populis sekalipun tak ada jaminan untuk mengawasi janji mereka dari komitmen awal.

Dari sisi caleg, banyak yang dapat kita lihat, mulai dari kualitas, popularitas sampai kekuatan finansial caleg. Bisa jadi di antara mereka sebagai kekuatan *civil society* yang tak terfasilitasi parpol peserta pemilu. Persoalannya kini,

bagaimana parpol merekrut caleg yang mampu memangku mandat dan dibuktikan kritis memahami kepentingan rakyat tapi tidak dipoles oleh kepentingan tertentu. Itulah poros kinerja anggota legislatif saat ini, yang tak mampu membendung nikmatnya kekuasaan. Banyak kasus stagnan dibahas legislatif yang tak terselesaikan, polaritasnya pengembangan kasus sehingga terlupakan.

Idealnya, penjaringan bakal caleg dilakukan di internal parpol guna menjaring caleg kualitas lebih terjamin. Partai mengetahui benar kapasitas, kapabilitas, dan rekam jejak setiap calegnya. Namun hal ideal tersebut tidak merealitas. Hampir semua parpol tampak tidak mengandalkan sumber daya eksternal untuk meraih suara. Mereka menjaring orang-orang di luar partai yang berminat menjadi caleg.

Patut kita lihat dalam penjaringan tersebut, apakah kredibilitas, kapasitas, dan rekam jejak telah menjadi penentu dalam seleksi? Tampaknya tidak demikian, sebab kekuatan finansial tetap saja menjadi ukuran. Biaya politik menjadi alasan untuk membeli biduk politik dalam pemilu

legislatif. Kecenderungan ini membuat rekrutmen caleg masih terlihat belum berubah.

Kalau mau menelusur langkah parpol menggaet caleg eksternal patut diapresiasi sebagai langkah mendobrak sistem oligarki-transaksional parpol. Kekuatan *civil society* akan tampil ke depan sehingga hanya sejumlah elite partai saja yang memonopoli kekuasaan. Namun sayang, masih ada kelemahan proses konsolidasi demokrasi sehingga parpol belum bisa menciptakan pola kaderisasi yang melembaga dalam suatu partai. Tidak jarang, berdampak terjadinya krisis regenerasi kader. Lihatlah, caleg yang beredar lebih kepada "daur ulang" dari figur lama.

Di sinilah parpol harus jadi melihat *branding* bukan sekadar *political look*, tapi *political performance*. Jangan sampai rekrutmen caleg berorientasi pada kerja organisasi demi menyenangkan basis konstituen sesaat. Parpol harus memiliki caleg yang benar-benar mengakar di tengah masyarakat dan bukan kader musiman, yakni politisi instan di tingkat lokal maupun nasional.

Politisi seperti itu pada akhirnya akan melahirkan sis-

tem politik yang bersifat artifisial dan tidak akan menyentuh kebutuhan mendasar (*basic needs*) masyarakat sesungguhnya. Selain itu, masyarakat yang memiliki hak pilih juga harus didorong untuk tidak asal memilih calon legislator mereka di pemilihan. Pesimisme akan luntur bila parpol mengubah pola rekrutmen, sehingga tidak terjadi kesan "perahu sewaan", jika parlemen mendatang lebih berkualitas.

Kita berharap politik di republik ini tidak seperti pasar tumpah di mana terjadi transaksi jual-beli. Siapa yang memiliki modal lebih besar, ia memiliki kemampuan untuk membeli kursi. Jika DPRD kabupaten/kota dan provinsi sebesar Rp 500 juta sampai dengan Rp 1 miliar untuk sosialisasi, paparan visi-misi, program kegiatan sosial dan mengunci suara pada hari-H pemilu. Pesimisme kemudian mengerucut bahwa parlemen hasil Pemilu 2014 akan diisi oleh caleg berkualitas. Akhirnya kembali pada masyarakat yang harus semakin pintar dan rasional ketika menentukan pilihan. Ini pentingnya rekam jejak caleg berdasarkan *track record*.***